

DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL TERHADAP PHK

Oleh :

Endang Sriningsih

Staff Pengajar POLITEKNIK "SAKTI" Surabaya

ABSTRACT

Crisis financial happened in latter months truly begin in United States. But the impact or effect to other nations, including Indonesia, cannot be obviated. Many circle of predicting this crisis in Indonesia will start felt in the year next. Possibly continue until year 2010. The decline of material requisition in American State and Japan for State of purpose of Indonesia exporting result the light sectors this exporting and result threat disconnection of job everywhere. So also some the companies in Surabaya, there is about 11 company, they have raised PHK to the employees, is mostly is medium scale company.

Crisis knocking over in this time still early. Estimate, crisis culminate at mid of knowing 2009. In this time sector is real will feel guncangan very heavy. For anticipating kemungkinahn crisis obsolesce financial the is global have to be looked by the solution, is more than anything else cure of economics in Indonesia not so strong. This thing is seen from Indonesia foreign exchange reserve which still weakens. At least, butuh time of two until three year for returning was normal. To break this financial crisis impact of government require to do inter alia: (1) Government have to pay attention to UMKM, (2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), (3) Reinforcement Of Performance Exported, and (4) Strengthen Economics Base on independence.

Keyword: Global crisis impact and PHK

Pendahuluan

Krisis finansial yang terjadi dalam bulan-bulan belakangan memang bermula di Amerika Serikat. Tetapi efek atau dampaknya kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia, tidak bisa dihindarkan. Hal ini berbeda dengan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997. Amerika Serikat dengan negara-negara besar lainnya tidak terpengaruh krisis yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur tersebut. Kata kuncinya jelas, Amerika Serikat merupakan negara raksasa secara ekonomi dan politik. Apa yang terjadi di negara itu langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap Negara-negara lain.

Negara-negara yang besaran ekonominya signifikan seperti Jepang, negara-negara Eropa, India, dan Tiongkok merasakan betul akibat krisis keuangan global ini. Tiongkok, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi Negara dengan jumlah devisa negara pada akhir September 2008 lalu sebesar USD 1,9 triliun itu harus dikoreksi. Yakni dari 11,9% (2007) dan 9,4% (2008) diprediksi akan turun menjadi 7,5% pada tahun depan. Ini sebuah penurunan yang lumayan besar meskipun angka pertumbuhannya masih cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan dikoreksi dari 6,1% (2008) diprediksi turun cukup tajam pada tahun 2009, yakni sekitar 4,5 - 4,9%. Ini berarti perekonomian akan melemah tajam dan berdampak besar di semua sektor. Pemutusan kerja di mana-mana akan bermunculan

Namun, demikian semua pesimis, ada yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada krisis kali ini berbeda dengan krisis ekonomi 1997/1998. Negara ini sudah mempunyai pengalaman, kenyataan kerugian perbankan nasional lebih sedikit dibandingkan perbankan di Asia. Bank Indonesia pun berusaha meredamnya dengan berbagai kebijakan, menurunkan BI rate ke 9,25%, pengaturan transaksi valas, meningkatkan penjaminan menjadi 2 miliar, dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dari krisis ini dengan cara mengalihkan pasar ekspor kita ke pasar domestik yang besar.

Pada awal-awalnya terjadinya krisis, kita masih optimis krisis itu tidak akan berpengaruh terhadap Indonesia. Belakangan optimis tersebut berkurang. Sejumlah indikator sederhana bisa dijadikan pijakan. Nilai rupiah terkoreksi cukup signifikan, lebih besar daripada rata-rata koreksi mata uang di negara-negara lain. Nilai ekspor kita juga menurun, ini sangat dipengaruhi dengan turunnya daya beli atau permintaan pasar di luar negeri.

Kondisi ini membuat kalangan industri tidak berani melakukan rencana bisnis yang muluk-muluk. Banyak target yang sudah direncanakan harus direvisi sejak pertengahan tahun ini. Dampak pembelian bahan baku yang kebanyakan masih impor jadi berkurang. Mereka lebih banyak melakukan strategi bertahan dulu, tidaklah mengherankan kalau para ekonom sepakat bahwa angka pertumbuhan ekonomi juga akan terkoreksi, khususnya untuk tahun depan.

Banyak kalangan memprediksi krisis ini di Indonesia akan mulai terasa pada tahun depan. Mungkin berlanjut sampai tahun 2010. Menurunnya permintaan barang di Negara Amerika dan Jepang sebagai Negara tujuan ekspor Indonesia mengakibatkan melemahnya sektor ekspor ini dan mengakibatkan ancaman pemutusan kerja di mana-mana.

Turunnya dari implikasi krisis itu ialah, angka pengangguran bisa jadi akan meningkat. Demikian pula halnya angka kemiskinan. Padahal seiring dengan mulai membaiknya perekonomian, angka pengangguran dan kemiskinan dalam tahun-tahun belakangan turun (kalau merujuk pada data BPS). Dalam kondisi semacam itu, pekerjaan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi semakin berat.

Di bidang ekonomi, pemerintah diharapkan memiliki kebijakan-kebijakan yang memungkinkan semua orang dan kelompok memiliki akses untuk memperoleh kemakmuran secara adil. Hal itu tidak terlepas dari realitas bahwa perjalanan mekanisme pasar tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan dan berlangsung secara fair. Dalam situasi seperti itu, kebijakan-kebijakan pemerintah lalu diperlukan, baik kebijakan di dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber-sumber yang dimiliki negara, kebijakan mengatur kekuatan-kekuatan ekonomi agar tidak merugikan (regulasi), serta kebijakan realokasi dan redistribusi sumber-sumber kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak beruntung.

Hanya untuk mengatasi implikasi krisis finansial Amerika Serikat itu, pemerintah tidak bisa diam dan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Sejumlah rancangan (kebijakan) telah disusun meski implementasinya tidak semuanya efektif. Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa pemerintah memang tidak bisa mengontrol pasar secara penuh. Tetapi, mengingat krisis itu bisa berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran dan kemiskinan,

sejumlah kebijakan yang bercorak populis mau tidak mau harus dibuat. Kalau tidak, nasib pengangguran dan kemiskinan akan semakin parah. Untuk itu pemerintah harus mampu meyakinkan pengkritiknya bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut lebih diarahkan untuk penyelamatan-penyelamatan.

Ribuan buruh di Jawa Timur terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja, karena terkena dampak krisis finansial global. Menurut Erlangga sekitar 11 ribu buruh sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur (Jawa Pos, tgl.11 desember, 2008).

Begitu juga beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya, ada sekitar 11 perusahaan, mereka sudah mengajukan PHK terhadap karyawannya, sebagian besar merupakan perusahaan berskala menengah. Perusahaan itu berasal dari beberapa kota. Di antaranya, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, probolinggo, Gresik, serta Nganjuk (Sumber Jawa Pos, Rabu 17 SDesember, 2008).

Sebelas perusahaan itu dipastikan akan mengambil langkah PHK masal, sebab perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan proses bipartite (penyelesaian antara buruh dan perusahaan) plus proses di tingkat penyelesaian hubungan industrial (PHI). Bahkan ada beberapa perusahaan sudah tutup karena bangkrut. Di Surabaya, tercatat ada empat perusahaan yang siap-siap gulung tikar. Hal serupa terjadi di tiga perusahaan Sidoarjo. Jika di total, jumlah karyawan yang terancam kena PHK mencapai 2.300 orang. Sementara itu satu perusahaan sudah mem PHK 1.314 orang karyawan (Sumber Jawa Pos, Rabu 17 SDesember, 2008).

Begitu juga krisis finansial global diprediksi bakal menjalar ke sektor riil. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diharapkan sebagai safety belt perekonomian bakal dapat tantangan berat. Kredit usaha rakyat bisa menjadi salah satu jalan untuk membuat UMKM tetap berputar. Dunia usaha bakal makin terdesak saat krisis seperti ini. Secara umum memang dampak ke sektor riil dari krisis ini tak bisa dihindari. Namun kalau kita bicara histories, sektor UMKM relatif tidak akan terlalu terpuruk. Krisis tahun 1997-1998 sudah memberikan pembuktian tentang hal itu. UMKM mampu bangkit kembali dalam waktu yang cepat.

Sektor ini lebih fleksibel, lebih adaptif terhadap berbagai situasi. Daya tahan sektor ini kuat karena pasarnya spesifik dan berada dalam lingkup yang kecil. Itu membuat mereka punya pasar yang pasti. Berbeda dengan korporasi besar, misalnya, yang dihadapkan pada potensi penurunan perekonomian dunia sehingga kinerja ekspor terancam turun.

Sejumlah pendorong gerak UMKM sudah ada tahun ini. Misalnya UU UMKM, ya itu menjadi salah satu hal positif bagi upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Ruang lingkungannya sudah jelas, arah pemberdayaannya juga sudah jelas. Diatur juga soal pola kemitraan. Itu salah satunya hingga dapat mengembangkan pola kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

Krisis yang melanda saat ini masih awal. Diperkirakan, krisis memuncak pada pertengahan tahun 2009. Saat ini sektor riil akan merasakan guncangan yang sangat berat. Untuk mengantisipasi kemungkinannya buruknya krisis finansial global tersebut harus dicari solusi, apalagi pemulihan ekonomi di Indonesia tidak begitu kuat. Hal ini dilihat dari cadangan devisa Indonesia yang masih lemah. Paling tidak, butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk kembali normal.

Mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut harus disiapkan jalan keluar. Apalagi recovery (pemulihan) ekonomi di Indonesia tidak begitu kuat. Hal ini dilihat dari cadangan devisa Indonesia yang masih lemah. Paling tidak butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk kembali normal. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus perekonomian misalkan akan mengucurkan dana Rp. 100 triliun untuk belanja infrastruktur dalam rangka meredam ancaman PHK dan menurunkan harga BBM.

Permasalahan

“ Bagaimana solusi pemerintah menyikapi dampak krisis finansial global ini terhadap PHK?”

Pembahasan

Pemerintah harus memperhatikan UMKM.

Dampak krisis finansial global yang terjadi serjak tahun lalu diperkirakan makin terasa tahun ini. Bukan dalam konteks makroekonomi, tetapi dari sisi mikro. Dunia usaha dipastikan akan mencatat penurunan kinerja meski beberapa sektor tetap tumbuh positif. Salah satu sektor industri yang menghadapi tantangan berat akibat krisis itu adalah manufaktur. Terpangkasnya order dari luar negeri akan berimbas pada turunnya kinerja industri. Dampak lanjutannya adalah terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Industri manufaktur adalah salah satu sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pemerintah bisa saja tetap percaya diri bahwa ketergantungan industri di Indonesia terhadap pasar ekspor tidak besar. Namun ketika pasar ekspor hilang, tidak mudah mengalihkan pasar luar negeri ke dalam negeri karena turunnya daya beli masyarakat akibat krisis. Yang lebih realistis mengalihkan pasar-pasar konvensional ke pasar-pasar baru di luar negeri, misalnya ke negara-negara Timur Tengah. Inipun bukan tanpa tantangan sama sekali. Sebab merebut pasar ekspor baru butuh proses yang panjang, mulai mengenalan melalui promosi, uji produk, hingga ke negosiasi. Tanpa dilakukan proses itu terlebih dahulu, sulit berharap pasar-pasar ekspor utama seperti AS dan Eropa akan tergantikan.

Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan tahun ini akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jumlahnya cukup besar, antara 500 ribu hingga 1 juta pekerja. Angka itu bisa lebih kecil atau sebaliknya. Kepastiannya menunggu ada atau tidaknya order pada bulan April nanti. Jika ada pesanan, PHK bisa dihindarkan. Sebaliknya, jika order benar-benar tidak ada, bertambahlah 1 juta pengangguran. Terlepas apakah yang di PHK, itu karyawan kontrak atau tetap, itu akan menjadi problem sosial yang harus dipecahkan pemerintah (Jawa Pos, 30 Januari 2009).

Bagaimana mengantisipasi gelombang PHK tersebut, tidak lain kecuali membangkitkan industri kecil dan menengah di dalam negeri (UMKM). Sektor UMKM secara teoretis bisa menjadi salah satu penopang perekonomian yang penting. Namun sering sektor itu kurang diberdayakan. Keberpihakan pemerintah melalui berbagai departemen masih parsial, tidak integral. Industri

besar juga masih memandang sebelah mata peran yang bisa dimainkan UMKM dalam menopang bisnis mereka. Sedangkan perbankan juga masih enggan memberikan support pendanaan kepada usaha kecil dan menengah.

Jika tetap mampu bergerak di tengah krisis seperti sekarang, sektor UMKM akan mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang luar biasa besar. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keberpihakan melalui kebijakan-kebijakan yang integral dan berdimensi jangka panjang. Percuma memberikan hibah uang kepada usaha kecil tanpa ada pembinaan dan membuka akses ke industri besar. Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong sektor perbankan untuk tidak enggan mengucurkan kredit ke sektor usaha kecil.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Krisis ekonomi global sebagai dampak krisis keuangan Amerika Serikat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu juga pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian regional, yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah krisis finansial global dengan cara mengucurkan dana untuk pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), melalui Departemen dalam Negeri, mulai bulan depan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.6,9 triliun untuk 57.008 desa yang terbesar di 4.371 kecamatan, 264 kabupaten/kota, dan 32 provinsi. Anggaran 6,9 triliun tersebut sudah termasuk alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) (Jawa Pos, 14 Desember 2008). Pelaksanaan kegiatan PNPM pada tahun 2009 merupakan salah satu program utama pemerintah dalam mengatasi dampak krisis keuangan global. Melalui program PNPM tersebut, diharapkan beban perekonomian masyarakat akan terbantu. Sebab PNPM mencakup pemerdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemberian BLM.

Menurut Mardiyanto, mengingatkan para kepala daerah untuk memfokuskan anggaran belanja 2009 bagi kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Misalnya, pengembangan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar rakyat, serta pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sedangkan kegiatan pengembangan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta optimalisasi pelaksanaan PNPM (Jawa Pos, 14 Desember 2008).

Selain itu pemerintah daerah fokus pada kegiatan lain yang dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan, dan mengoptimalkan pemanfaatan produk dalam negeri. Misalnya, saat di daerah krisis pupuk, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Untuk penanganan kelangkaan pupuk di tingkat petani, sesuai kesepakatan pembahasan pemerintah dan DPR, perlu penguatan peran dan fungsi gubernur, bupati, dan walikota. Itu untuk memperlancar mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, melaksanakan operasi pasar, serta meningkatkan akses komunikasi petani, pemda, serta produsen.

Penguatan Kinerja Ekspor

Krisis finansial global juga mengancam kinerja ekspor Indonesia. Pengusaha menilai kondisi itu harus segera diantisipasi dengan memperkuat pembiayaan ekspor. Jika ini dilakukan, akan tercipta jaring pengaman perekonomian secara luas dan dapat memperkuat kinerja pelaku usaha. Pada akhirnya itu akan menghindarkan ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja), penguatan pembiayaan ekspor akan menjadi alternatif mengatasi kelesuan pasar dunia. Dengan pembayaran ekspor para pelaku usaha bisa memutar roda bisnisnya agar berproduksi sekaligus mencari pasar baru. Pelaku usaha yang berorientasi ekspor mesti terus berkreatifitas dan harus didukung. Meski begitu, mereka ada peluang untuk terus mengembangkan pasar ekspor. Sejumlah Negara yang masih kuat ekonominya layak dijadikan sasaran pasar ekspor baru.

Penguatan kinerja ekspor juga akan meningkatkan surplus neraca perdagangan dan devisa yang dihasilkan akan memperkuat rupiah. Oleh karena itu perlu memperkuat pembiayaan ekspor. Pendapat ini didukung oleh Direktur Treasury dan International banking Bank BNI Bien Subiantoro mengatakan perbankan nasional mesti mendukung pembiayaan ekspor. Untuk mendukung finansial ekspor, yang harus dilakukan kali pertama adalah menambah likuiditas USD. Misalnya Bank-bank besar terus memperkuat likuiditas valasnya. PT. Bank BNI Tbk, bank pelat merah itu memanfaatkan mekanisme pinjaman dari bank asing untuk menambah likuiditas USD. Untuk kepentingan tersebut, BNI memperoleh pinjaman USD 100 juta dari Wachovia Bank, bank terbesar keempat di Amerika Serikat (AS).

Pemberian bilateral loan itu diberikan dalam dua skema, yaitu USD 50 juta untuk *trade financing* dan USD 50 juta untuk modal kerja. Ini bagian untuk memperkuat likuiditas valas BNI.

Pemerintah memang *all-out* menghadap tahun 2009 menggelontorkan dana Rp. 100 triliun untuk pembangunan infrastruktur, Rp.72 triliun untuk keperluan belanja modal departemen-departemen, dan Rp. 24 triliun untuk ditransfer ke daerah-daerah lewat APBD. Memang dapat dibayangkan dana sebesar itu akan memiliki *multiplier effect* atau efek ganda yang besar. Mulai bangkitnya supplier barang-barang modal sampai ribuan orang yang akan jadi tenaga kerja pembangunan infrastruktur itu.

Perkuat Ekonomi Berbasis kemandirian

Masalah-masalah ekonomi yang selama ini muncul, jika disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, sudah barang tentu harus segera disadari untuk segera diperbaiki. Sedangkan masalah-masalah yang muncul karena keterkaitan dengan perekonomian dunia, secara hati-hati kita cermati agar kelihatan jelas, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Kekhawatiran terhadap ancaman krisis ekonomi global, misalnya harus mendorong pemerintah untuk melihat lebih cermat apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Formula yang dirumuskan pemerintah di antaranya untuk memperkuat pasar domestik dan memfokuskan produksi dalam negeri harus segera dilaksanakan dalam kebijakan yang kongkret.

Paket kebijakan stimulus, jika tidak disiapkan dengan baik, tidak akan banyak manfaatnya. Pemerintah perlu mencari solusi yang pasti untuk memperkuat ekonomi domestik berbasis kemandirian. Ekonomi yang bertumpu pada kekuatan dalam negeri. Kekuatan sumber daya alam dapat menjadi potensi luar biasa. Rendra (Jawa Pos, 5 Januari 2009) menggambarkan kekuatan pasar dalam negeri yang tahan oleh hantaman krisis misalnya industri rokok. Kekuatan industri rokok ini bisa kukuh dan mengakar karena ditopang oleh kekuatan sendiri, kekuatan dalam negeri. Mulai dari tembakau, cengkeh, dan kertas pembungkusnya semuanya hasil dari sumber daya alam Indonesia. Pasarnya juga kukuh karena juga pasar dalam negeri yang begitu besar.

Ancaman krisis ekonomi yang sudah diambang pintu mau tidak mau harus kita hadapi di tahu sekarang ini. Namun, yang jelas perlu ada perubahan dalam pengelolaan ekonomi kita. Ekonomi yang terlalu liberal dan sangat bergantung pada luar negeri terbukti rawan terhadap berbagai guncangan dan tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sektor manufaktur stagnan. Yang banyak berkembang justru sektor informal yang jelas-jelas merupakan *safety nets* masyarakat dalam kondisi ekonomi yang terpuruk ini. Ini bukan merupakan indikator kemajuan ekonomi kita. Tidak ada pilihan lain untuk bisa bangkit kecuali kerja keras dengan kekuatan sendiri. Kita harus menggarap ekonomi domestik dengan serius. Seperti ekonomi Negara-negara maju AS atau Jepang, bahkan Tiongkok ternyata selama ini juga menggarap ekonomi domestiknya dengan serius (Jawa Pos, 5 Januari 2009).

Kita jelas modal dasar yang tidak kalah dengan mereka, karena kita memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Kekayaan sumber daya alam kita dan penduduk dapat menjadi aset modal pembangunan ekonomi, serta dapat menjadi pasar bagi produk kita sendiri. Untuk itu banyak yang harus dibenahi. Terutama mengubah mindset kita agar mengutamakan pembangunan ekonomi domestik dengan mandiri serta melibatkan semua pihak terkait. Itu merupakan modal untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi sekarang ini.

Mengatasi dampak krisis Surabaya

Untuk mengatasi dampak krisis di Surabaya, pemerintah kota memfokuskan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas pembangunan upaya nyata mengatasi dampak krisis di Surabaya dengan meningkatkan APBD tahun 2009 sebesar Rp. 4 triliun merupakan salah satu APBD Kota/Kabupaten terbesar di Indonesia. Bahkan setiap tahun menjadi penyokong terbesar APBD Propinsi Jawa Timur, karena menyumbang lebih dari Rp. 3 triliun dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor milik warga kota. Surabaya juga merupakan kontributor terbesar APBN dari pajak, terutama cukai rokok yang dapat mencapai puluhan triliun rupiah pertahun.

Perubahan orientasi pembangunan makin menimbulkan optimisme bagi warga kota. Hal ini tampak dalam APBD Surabaya tahun 2009, sekitar 70 % dialokasikan untuk belanja langsung. Terdapat belanja langsung sebesar 2,8 triliun yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena sebagian besar dialokasikan untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Anggaran ini diharapkan menjadi stimulus untuk Bergeraknya

ekonomi di sektor swasta. Di mana jika dilihat rasio selama ini, APBD Surabaya mampu menjadi stimulus Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari lima 50 kali.

APBD Surabaya tahun 2009 itu memang menarik, karena dari Rp.1,2 triliun belanja tak langsung lebih dari 714 miliar ternyata dialokasikan untuk pendidikan. Mulai dari Gaji Guru, Bantuan Hibah untuk sekolah sampai bantuan social untuk anak usia sekolah yang belum sekolah. Kelak diharapkan tidak ada alasan untuk tidak dapat sekolah.

Salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kota Surabaya yang membutuhkan kerja sama dengan semua pihak ialah: Peningkatan Ekonomi Rakyat. Inisiatif ini memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta *social energy* dari media dan masyarakat luas. Dengan bekerja sama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat memanfaatkan potensi ekonomi 38 juta penduduk Jawa Timur.

Semua upaya yang dilakukan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Surabaya sebagai kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas dan Peduli. Namun dalam kondisi krisis semacam ini, diperlukan lebih banyak usaha untuk meningkatkan partisipasi publik, sehingga Surabaya dapat menjadi tempat hunian yang nyaman dan tempat usaha yang menguntungkan.

Penutup

Krisis finansial yang terjadi dalam bulan-bulan belakangan memang bermula di Amerika Serikat. Tetapi efek atau dampaknya kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia, tidak bisa dihindarkan. Banyak kalangan memprediksi krisis ini di Indonesia akan mulai terasa pada tahun depan. Mungkin berlanjut sampai tahun 2010. Menurunnya permintaan barang di Negara Amerika dan Jepang sebagai Negara tujuan ekspor Indonesia mengakibatkan melemahnya sector ekspor ini dan mengakibatkan ancaman pemutusan kerja di mana-mana. Begitu juga beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya, ada sekitar 11 perusahaan, mereka sudah mengajukan PHK terhadap karyawannya, sebagian besar merupakan perusahaan berskala menengah.

Saat ini sektor riil akan merasakan guncangan yang sangat berat. Untuk mengantisipasi kemungkinannya buruknya krisis finansial global tersebut harus dicarikan solusinya, apalagi pemulihan ekonomi di Indonesia tidak begitu kuat. Hal ini dilihat dari cadangan devisa Indonesia yang masih lemah. Paling tidak, butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk kembali normal. Tidak ada pilihan lain untuk bisa bangkit kecuali kerja keras dengan kekuatan sendiri. Kita harus menggarap ekonomi domestik dengan serius. Seperti ekonomi Negara-negara maju AS atau Jepang, bahkan Tiongkok ternyata selama ini juga menggarap ekonomi domestiknya dengan serius

Untuk memecahkan dampak krisis finansial ini pemerintah perlu melakukan antara lain: (1) pemerintah harus memperhatikan UMKM, (2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), (3) Penguatan Kinerja Ekspor, dan (4) Perkuat Ekonomi Berbasis kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), *Pemutusan Hubungan Kerja*, Sumber Jawa Pos 30 Januari 2009
- Ghazali, Abd. Rohuim, 1998, *Kapan Badai akan Berlalu*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Rendra, 2009, *Kekuatan Pasar dalam negeri*, Sumber: Jawa Pos, 5 Januari 2009.
- Sumodiningrat, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta